

KURIKULUM UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF

(The Curriculum For Special Needs Students in Inclusive School)

Khutamy Khairunnisa^a, Siti Luthfah^b, Silvia Nurtasila^c, Ira Purnama Sari^d

^{abcd}Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: Khutamykhair@student.upi.edu

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA Negeri inklusif di Jakarta dengan subyek penelitiannya, yaitu: wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana sekaligus koordinator program pendidikan inklusif, 3 guru mata pelajaran yang mengajar di tingkat yang berbeda dan mata pelajaran berbeda pula, 3 siswa berkebutuhan khusus yang berbeda tingkatan kelas, 2 siswa umum yang berada di tingkat berbeda. Kemudian untuk melakukan validasi data, peneliti menggunakan triangulasi data (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan triangulasi sumber. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar panduan pertanyaan wawancara yang diadaptasi dari Yu (2009) dan Kustawan (2012), lembar panduan observasi yang diadaptasi dari Yu (2009) dan UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang hambatan, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus merupakan kurikulum yang mengalami fleksibilitas. Namun di sekolah tersebut belum seutuhnya melakukan fleksibilitas kurikulum. Dikarenakan ada beberapa karakteristik kurikulum yang digunakan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terpenuhi dan ada beberapa karakteristik yang belum terpenuhi. Peneliti menyarankan kepada pihak sekolah untuk lebih memahami bagaimana pengimplementasian kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Kata Kunci: *Fleksibilitas kurikulum, anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif*

Abstract: The purpose of this research is to describe the curriculum used for special needs student in inclusive school. The kind of research used is qualitative with the methods descriptive. This research was conducted in one of the inclusive high schools in Jakarta in the subject of this research, namely: vice principal of curriculum, vice principal of facilities and infrastructure as well as program coordinator inclusive education, three subject teacher who teach in different levels and subject different also, three special needs student from different levels class, and two students general who were at the different levels class. Then to do of data validation, researchers used triangulation data and triangulation of source. An instrument used in this research was sheets question guides interview adapted from Yu (2009) and Kustawan (2012), sheets of guide observation adapted from Yu (2009) and law no.4 of 1997 on disable, and documentation. The results of this research stated that curriculum for special needs student is the curriculum experienced flexibility. But that school has not completely do flexibility curriculum. Because there are several characteristics of the curriculum used to school held education inclusive are being fulfilled and there are several characteristics of that have not been. The researchers suggest to the school to better understand how the implementation of the curriculum for special needs student in inclusive school.

Keywords: *Flexibility curriculum, special needs student, inclusive school*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk mengembangkan dirinya. Hal ini diungkapkan dalam UUD 1945 pasal 28c ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa “setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Jika memang benar adanya, maka semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus yang diakibatkan oleh hambataannya (Amadio, 2009).

Pada tahun 1994 diumumkan deklarasi Salamanca (UNESCO) yang ditandatangani oleh menteri pendidikan dari beberapa negara. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Melalui pendidikan inklusif lah, sekolah dibuat untuk siap menerima semua anak berkebutuhan khusus. Menurut Evans (2007) pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan.

Pendidikan inklusif itu dapat berjalan jika diimplementasikan dalam sistem sekolah. Menurut Kustawan (2012) ada pun sekolah yang

mengimplementasikan pendidikan inklusif harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini:

- Telah memiliki ijin operasional dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel;
- Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- Tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik;
- Mendapat rekomendasi penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Pemerintah Provinsi. (Persyaratan nomor 6 ini berkaitan erat dengan fasilitas atau dukungan dana atau sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif).

Kurikulum merupakan salah satu persyaratan yang penting, karena kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sariono, 2013). Kemudian anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen maupun sementara sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda (Santono dalam Putri, 2015). Lalu bagaimana dengan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus? Kurikulum yang digunakan haruslah kurikulum yang fleksibel atau kurikulum yang mengalami modifikasi (Kustawan, 2012). Kurikulum fleksibel di sini artinya sekolah tetap menggunakan kurikulum yang dibuat pemerintah hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan anak (Mayasari, 2016)

Jakarta, merupakan salah satu kota di Indonesia yang sangat terlihat jelas terus mengembangkan pendidikan inklusif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah sejak tahun 2001. Pada tahun 2001, terdapat 54 sekolah inklusif. Menurut data terakhir Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 terdapat 374 sekolah inklusif, yang terdiri dari: 9 TK, 261 SD, 74 SMP, 16 SMA, dan 15 SMK. Berdasarkan data tersebut jumlah SMA lebih sedikit dibandingkan SD dan SMP. Selain jumlah sekolah yang banyak, Pemerintah DKI Jakarta juga membuat peraturan daerah tersendiri yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan salah satu acuan untuk pengimplementasian pendidikan inklusif agar sesuai dengan tujuannya. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah :

- Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis;
- Memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan;
- Memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Saat ini terdapat banyak sekolah inklusif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan semua anak-anak termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Namun, pada kenyataannya terdapat sekolah inklusif yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut menyebabkan sekolah inklusif belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus seluruhnya. Menurut Kustawan (2012: 37), masih ada sekolah inklusif yang tidak ramah terhadap semua anak, bahkan terdapat sekolah inklusif yang mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga pihak yang merasa terbebani dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka belum memahami bagaimana cara memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (dalam Mudjito, Harizal & Elfindri, 2012: 17) rendahnya layanan anak berkebutuhan khusus disebabkan pula oleh kurangnya tenaga pendidik yang mau dan mampu mendidik ABK, sekolah belum siap memberikan aksesibilitas untuk pendidikan ABK, dan kecilnya anggaran operasional yang disediakan Pemerintah Daerah untuk sekolah. Permasalahan di atas timbul salah satunya disebabkan oleh kurangnya persiapan dan implementasi kurikulum.

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini berjudul: "Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif". Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang sudah cukup lama mengimplementasikan pendidikan inklusif. Selain itu jikalau sekolah tersebut dirasa belum dapat menggunakan kurikulum fleksibilitas seutuhnya, maka harus diadakan sebuah evaluasi. Hal tersebut dilakukan agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Emzir (2010), kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena ataupun aktivitas yang terjadi di lingkungan penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih peneliti, karena peneliti ingin mengetahui gambaran kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sebuah SMA

inklusif dengan berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat itu juga.

Subjek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA Negeri inklusif di Jakarta. Penentuan sekolah pun disesuaikan dengan kriteria sekolah inklusif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sekolah yang diteliti merupakan sekolah yang sudah memiliki SK sekolah inklusif dari pemerintah Prov DKI Jakarta;
2. Sekolah tersebut mengetahui Pergub Prov DKI Jakarta No. 116 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
3. Sekolah tersebut merupakan sekolah negeri yang telah mengimplementasikan pendidikan inklusif cukup lama. Hal tersebut dilakukan karena peneliti juga ingin melihat bagaimana kualitas anak-anak berkebutuhan khusus yang telah lulus dari sekolah tersebut;

Subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih menggunakan *Purposive Sampling*. Hal tersebut dilakukan karena peneliti membutuhkan partisipan yang sesuai dengan karakteristik untuk mencapai tujuan penelitian dalam waktu yang secepat mungkin. Subjek penelitian atau partisipan dalam penelitian ini adalah semua yang diharapkan memiliki informasi tentang kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus tersebut, yaitu: wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana yang juga sebagai koordinator program pendidikan inklusif, 3 guru mata pelajaran yang mengajar di tingkat yang berbeda dan mata pelajaran berbeda pula, 3 siswa yang berkebutuhan khusus yang berada di tingkat berbeda, 2 siswa umum yang berada di tingkat berbeda. Kemudian untuk melakukan validasi data, peneliti menggunakan triangulasi data (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan triangulasi sumber.

Definisi operasional

Di dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Kurikulum fleksibel adalah kurikulum yang mengalami modifikasi, dll. Menurut Kustawan (2012: 60), adapun kriteria kurikulum fleksibel, yaitu:

- Memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK);
- Memiliki KTSP yang lebih peka dalam mempertimbangkan keragaman peserta didik agar pembelajarannya relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik;
- Melaksanakan asesmen yaitu proses pengumpulan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan peserta didik tersebut;

- Selain memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Satuan pendidik memiliki program pembelajaran individual (PPI) yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bobot materi berbeda dari kelompok dalam kelas dan dilaksanakan dalam setting klasikal;
- Merancang atau membuat bahan ajar atau materi pendidikan yang sensitif gender dan tidak mempromosikan peran gender yang mendiskriminasi;
- Guru mampu menggunakan berbagai pendekatan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- Menjamin tersedianya fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai baik untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan;
- Melakukan penyesuaian-penyesuaian materi, cara dan waktu dalam penilaian hasil belajar;
- Memiliki tim pengembang kurikulum yang komprehensif, antara lain beranggotakan guru pendamping khusus, guru sekolah umum, kepala sekolah, orang tua, dan ahli yang berkaitan dengan kebutuhan khusus peserta didik;
- Menyediakan program khusus bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, termasuk peserta didik yang berkesulitan belajar atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (PKBI);
- Bekerjasama dengan pusat sumber (*resource center*) untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memahami keberagaman peserta didik, identifikasi dan asesmen, PPI, penguasaan program khusus (orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita ringan dan sedang, bina diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras);
- Menyediakan sarana dan prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik, contoh untuk peserta didik tunanetra: riglet dan pen, serta mesin tik Braille;
- Orang tua peserta didik terlibat dalam penyusunan dan dalam pembelajaran peserta didik yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan;
- Di samping menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk peserta didik pada umumnya, sekolah/guru menentukan juga KKM berdasarkan *baseline* untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang *low function* dan *high function*.

Intrumen dan teknik pengumpulan data

Wawancara semi struktur

Wawancara semi struktur dilakukan kepada kepala sekolah (yang diwakilkan oleh wakasek kurikulum), wakasek kurikulum, wakasek sarana dan

prasarana yang sekaligus menjadi koordinator program pendidikan inklusif, 3 guru mata pelajaran (Ekonomi kelas X, Bahasa Jepang kelas XI, dan Matematika kelas XII), 3 siswa/i yang berkebutuhan khusus (2 siswa/i yang memiliki hambatan penglihatan di kelas X dan XII, 1 siswa/i yang memiliki hambatan pendengaran di kelas XI), dan 2 siswa umum (1 siswa/i kelas XI dan 1 siswa kelas X).

Lembar panduan pertanyaan wawancara untuk kepala sekolah yang diwakilkan oleh wakasek kurikulum dan guru merupakan lembar panduan pertanyaan wawancara yang diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dari Yu (2009), *explaining variations in the local implementation of a national policy: inclusive education in for Beijing school*. Kemudian lembar panduan pertanyaan wawancara untuk wakasek kurikulum sendiri adalah turunan dari karakteristik kurikulum fleksibel Kustawan (2012). Sedangkan lembar panduan pertanyaan wawancara untuk wakasek sarana prasarana sekaligus koordinator pendidikan inklusif merupakan hasil adaptasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dari penelitian Laelasari tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah X di kota Bandung pada tahun 2013. Sementara lembar panduan pertanyaan wawancara untuk siswa berkebutuhan khusus dan siswa pada umumnya adalah lembar panduan pertanyaan wawancara yang disusun oleh peneliti sendiri.

Observasi

Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti pun melakukan observasi. Menurut Emzir (2010) observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan catatan lapangan yang bersifat deskriptif mengenai tingkah laku dengan cara mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi yang dilakukan mengenai sarana dan prasarana pendidikan, proses belajar mengajar di 3 kelas yang berbeda (X IPS 3, XI IPS 2, dan XI IPS 1).

Lembar panduan observasi yang digunakan untuk mengobservasi sarana dan prasarana lingkungan sekolah merupakan turunan dari UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Kemudian lembar panduan observasi yang digunakan untuk mengobservasi proses belajar mengajar adalah lembar panduan observasi yang diadaptasi dari Yu (2009), *teacher observation/data collection form, West Virginia Board of Education*.

Dokumentasi

Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti pun mengambil data secara dokumentasi yaitu: SK sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, data-data sekolah dari pihak administrasi sekolah, dll. Pengambilan data secara dokumentasi atau studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono dalam Laelasari, 2013).

Triangulasi

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka untuk validasi data yang diperoleh peneliti melakukan triangulasi data dan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (dalam Laelasari, 2013), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kemudian dengan menggunakan triangulasi data, peneliti dapat memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara berbagai sumber dengan data yang diperoleh melalui observasi sertadokumentasi. Kemudian menurut Laelasari (2013), jika melalui proses wawancara yang dilakukan terhadap beberapa sumber data untuk memperoleh data yang sama, maka data yang diperoleh akan lebih kuat dan akurat.

Metode analisis

Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007) adalah

1. Mencatat hasil pengamatan yang diperoleh melalui wawancara berbagai sumber, observasi dan dokumentasi dalam bentuk transkrip;
2. Peneliti melakukan pengkodean data, lalu data dipilah-pilah untuk menajamkan serta mengarahkan dan membuang yang tidak perlu;
3. Validasi data yang telah diperoleh melalui triangulasi data (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan triangulasi sumber;
4. Menganalisis data-data tersebut dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan cara memberikan penjelasan yang bersifat kualitatif. Data yang telah dikelompokkan sebelumnya diberi penjelasan satu persatu menurut bahasa peneliti;
5. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tentang gambaran bagaimana implementasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

HASIL PENELITIAN

Gambaran umum subjek penelitian

SMA Negeri "X" Jakarta merupakan salah satu SMA Negeri yang mengimplementasikan pendidikan inklusif dan mendapatkan SK sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2001. SMA Negeri "X" Jakarta dikepalai oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah yang sedang menjabat saat ini adalah kepala sekolah yang baru menjabat kurang lebih 2 tahun. Kemudian jumlah guru di sekolah tersebut adalah 53 orang guru dengan satu guru diantaranya adalah guru pendamping khusus. SMA Negeri "X" Jakarta memiliki 769 siswa, 329 laki-laki, 440 perempuan, 9 orang siswa/i diantaranya adalah siswa/i yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu; 1 siswa dan 1 siswi dengan hambatan pendengaran, 1 siswa dengan

autism, dan 3 siswa serta 1 siswi dengan hambatan penglihatan. Sekolah tersebut memiliki 7 kelas di setiap angkatan. Sehingga jumlah kelas keseluruhan adalah 21 kelas dengan 6 kelas diantaranya merupakan kelas inklusif.

Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri "X" Jakarta, pada umumnya dimulai pukul 07.00 pagi dan berakhir pada pukul 15.15 sore dengan jumlah jam pelajaran dalam satu harinya mencapai 9 jam mata pelajaran. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki hambatan belajar dan anak berkebutuhan khusus, akan ada jam tambahan setiap satu bulan sekali untuk bertemu dengan guru pendamping khusus.

Subjek penelitian atau partisipan dalam penelitian ini adalah wakasek kurikulum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan berkebutuhan khusus, wakasek sarana dan prasarana yang sekaligus menjadi koordinator program pendidikan inklusif yang tentunya memiliki latar belakang tentang pendidikan berkebutuhan khusus, 3 guru mata pelajaran (Ekonomi kelas X, Bahasa Jepang kelas XI, dan Matematika kelas XII) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan berkebutuhan khusus, 3 siswa/i yang berkebutuhan khusus (2 siswa/i yang memiliki hambatan penglihatan di kelas X dan XII, 1 siswi yang memiliki hambatan pendengaran di kelas XI), dan 2 siswa umum (1 siswi kelas XI dan 1 siswa kelas X).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara berbagai sumber, observasi sarana prasarana dan proses pembelajaran, serta dokumentasi. Dari data yang telah diperoleh, peneliti berhasil mendapatkan gambaran tentang kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif:

Kurikulum

Sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Kurikulum 2013 untuk anak-anak kelas X dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk anak-anak kelas XI dan XII. Kurikulum yang digunakan juga kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Sekolah juga menggunakan kurikulum yang lebih peka dalam mempertimbangkan keragaman peserta didik agar pembelajarannya relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian guru pun menggunakan berbagai pendekatan mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. "*Kurikulum sekolah inklusif sama aja dengan anak-anak lain, ngga ada bedanya... Ya, tapi ngajarnya juga harus disesuaikan sama kebutuhan anaknya.*" (Wakasek Kurikulum)

Hal tersebut juga didukung oleh wakasek sarpras sekaligus koordinator pendidikan inklusif. Beliau mengatakan bahwa: "*Mereka itu mengikuti kurikulum secara nasional...*" (Wakasek Sarpras sekaligus Koordinator Pendidikan Inklusif)

Kemudian sekolah melaksanakan asesmen yaitu proses pengumpulan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan peserta didik tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh wakasek kurikulum, koordinator pendidikan inklusif sekaligus wakasek sarana prasarana, dan guru. "*...Kalau anak ini mau masuk, kita wawancara orang tuanya kita wawancara anaknya...*" (Wakasek Kurikulum) "*...Karena asesmen dan tindak lanjut telah disepakati antara peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah ketika daftar di awal...*" (Wakasek Sarpras sekaligus Koordinator Pendidikan Inklusif) "*Tahun 2013 anak-anak yang berkebutuhan khusus masuk lewat jalur khusus. Tapi tetep ada sesi wawancara untuk mengetahui background anak-anaknya. sama untuk memudahkan proses pembelajaran, berarti harus bekerjasama dengan orang tua juga.*" (Guru Matematika kelas XII)

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya sekolah tersebut melibatkan orang tua peserta didik dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran peserta didik yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Kemudian sekolah memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), namun sekolah tersebut belum memiliki program pembelajaran individual (PPI) yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan bobot materi berbeda dari kelompok dalam kelas dan dilaksanakan dalam setting klasikal. "*...tidak ada RPP khusus... Tapi KKMnya yang dibedakan, misal untuk anak biasanya 75, untuk mereka tidak 75.*" (Wakasek Kurikulum)

Tetapi ketika sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk peserta didik pada umumnya, sekolah/guru menentukan juga KKM berdasarkan *baseline* untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang *low function* dan *high function*. Selain itu, sekolah belum menyediakan program khusus bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, termasuk peserta didik yang berkesulitan belajar atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (PKBI). Hal tersebut didukung oleh pernyataan koordinator pendidikan inklusif sekaligus wakasek sarana prasarana, dan guru. Mereka mengungkapkan bahwa:

"*Anak tersebut akan disiapkan sama dengan anak umum lainnya, baik SK, KD dan indikatornya. Bahasa kita, materi esensinya. Target pencapaian nilai terendah bahasa kita KKMnya.*" (Wakasek Sarpras sekaligus Koordinator Pendidikan Inklusif) "*RPP ada sih, kalau PPI ngga sih. ya anaknya harus lebih diberi layanan khusus. Kemudian standard kelulusan nilainya pun sedikit diturunkan atau tidak 100% sama...*" (Guru Ekonomi kelas X)

Berdasarkan pernyataan di atas juga dapat dilihat bahwa sekolah tersebut merancang atau membuat bahan ajar atau materi pendidikan yang sensitif gender dan tidak mempromosikan peran gender yang mendiskriminasi. Kemudian sekolah tentunya

melakukan penyesuaian-penyesuaian materi, cara dan waktu dalam penilaian hasil belajar.

Namun, sekolah belum sepenuhnya menjamin tersedianya fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai baik untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan. Selain itu sekolah pun belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sepenuhnya (contoh untuk peserta didik tunanetra: sudah ada riglet, pen, laptop, braille. Namun, belum terdapat buku pelajaran dalam tulisan braille). Hal ini diungkapkan koordinator pendidikan inklusif sekaligus wakasek sarana prasarana, dan guru.

"Maka Supaya layanannya lebih maksimal anak dengan hambatan penglihatan tadi kami lengkapi dengan IT... Dan barang ini bantuan dari dinas bukan dari orang tua, dan mereka familiar dengan IT...". (Wakasek Sarpras sekaligus Koordinator Pendidikan Inklusif)

"...Harusnya ada buku yang pake braille, tetapi belum tersedia di sekolah ini...Kita dapat bantuan, seperti anak itu dibelikan laptop headset satu perangkat yang diberikan suaranya...". (Guru Ekonomi kelas X)

Meskipun sekolah tersebut belum menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana sepenuhnya. Namun pihak sekolah tetap berusaha untuk memperbaikinya dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Khusus untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan, SMA Negeri "X" Jakarta telah bekerja sama dengan Mitra netra. Sedangkan untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran, sekolah tersebut bekerja sama dengan Santirama.

"Mitra sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu dinas dan karena anak berkebutuhan khusus disini banyaknya adalah anak-anak yang tunanetra maka sekolah pun bermitra dengan yayasan Mitra yang ada di Lebak Bulus". (Wakasek Kurikulum)

"...Kemudian kami juga melakukan tentang bagaimana layanan khusus baik dari mitranetra, kemudian PKLK. Kemudian dari yayasan tunarungu, santirama". (Wakasek Sarpras sekaligus Koordinator Pendidikan Inklusif)

Jika menurut paparan hasil penelitian tentang kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut yang dijabarkan sesuai dengan karakteristik kurikulum fleksibel untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka sekolah tersebut belum sepenuhnya menggunakan kurikulum fleksibel.

Diskusi

Menurut Rumahlatu, dkk (2016), kurikulum bagaikan kompas dalam sebuah kapal yang menjadi penunjuk arah. Pada dasarnya kurikulum memiliki tiga dasar pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran (Sariono, 2013)

Menurut Susanto (2012) dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, kurikulum

yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait. Kustawan (2012) kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah kurikulum yang disesuaikan (fleksibilitas kurikulum) dengan kebutuhan setiap peserta didik yang meliputi standar kompetensi lulusan dan standar isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar). Untuk mengetahui sekolah tersebut melakukan fleksibilitas kurikulum tentunya terdapat beberapa karakteristik.

Namun berdasarkan hasil penelitian, sekolah tersebut belum sepenuhnya melakukan fleksibilitas kurikulum, dikarenakan ada beberapa karakteristik yang terpenuhi dan ada beberapa karakteristik yang belum terpenuhi. Beberapa karakteristik yang belum terpenuhi seutuhnya tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: beberapa sarana dan prasarana (fasilitas) yang belum tersedia, salah satunya adalah buku pelajaran yang ditulis dengan huruf braille untuk anak-anak yang memiliki hambatan penglihatan (tunanetra). Seharusnya sekolah menyediakan fasilitas tersebut, karena dengan tidak adanya fasilitas tersebut berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar untuk siswa yang memiliki hambatan penglihatan (tunanetra) tersebut. Hal ini juga diutarakan oleh salah satu guru di kelas X, beliau mengatakan bahwa dengan tidak tersedianya buku-buku pelajaran dengan tulisan Braille proses belajar mengajarpun menjadi terhambat.

Kemudian untuk masalah belum adanya program pembelajaran individual (PPI) dan program khusus untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (PKBI). Menurut wakasek kesiswaan, hal tersebut sulit dilakukan karena sekolah tersebut memang menggunakan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang wajib digunakan oleh sekolah reguler. Oleh karena itu tidak terdapat RPP khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Selain itu menurut koordinator pendidikan inklusif, sekolah ini adalah sekolah reguler yang kurikulum dan hal-hal yang berkaitan dengan operasi sekolah semuanya mengikuti aturan dinas pendidikan. Oleh karena itu tidak ada RPP khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang ada hanya layanan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengapa tidak?, hal tersebut dikatakan sebagai PPI. Padahal menurut Mudjito, Harizal, Elfindri (2012) kurikulum yang disesuaikan untuk pendidikan inklusif

di dalamnya terdapat kurikulum reguler dan program pembelajaran individu (PPI). Sehingga sekolah tentunya masih harus melengkapi hal tersebut. Hal ini bisa kita contoh dari negara Finlandia yang tentunya sudah menerapkan kurikulum fleksibel dengan baik (Halinen & Jarvinen, 2008).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian didapatkan gambaran kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. SMA Negeri "X" Jakarta merupakan sekolah inklusif yang belum seutuhnya melakukan fleksibilitas kurikulum. Dikarenakan ada beberapa karakteristik kurikulum yang digunakan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terpenuhi dan ada beberapa karakteristik yang belum terpenuhi.

Saran

Melalui hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran agar kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dapat berjalan seutuhnya, yaitu:

- a. Bagi guru-guru yang belum sabar mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, dibutuhkan kesabaran serta persiapan yang lebih untuk mengajari mereka. Jika guru-guru dapat lebih sabar dan mempersiapkan segalanya maka proses belajar mengajar di kelas inklusif pun akan lebih mudah.
- b. Sarana prasarana merupakan salah satu komponen yang dapat menyukseskan implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu bagi sekolah inklusif yang memiliki anak-anak dengan hambatan penglihatan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan yayasan mitra netra untuk pengadaan buku mata pelajaran dalam tulisan braille yang akan sama digunakan seperti anak-anak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadio, M. (2009). *Inclusive education in Latin America and the Caribbean: exploratory analysis of the national reports presented at the 2008 international conference on education*. UNESCO IBE. Switzerland. Diunduh pada 20 Oktober 2013 dari <http://search.proquest.com>
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada.
- Evans, I. (2007). *Inclusion*. New york: Rroutledge.
- Halinen, I; Jarvinen, R. (2008). *Towards inclusive education: the case of Finland*. UNESCO IBE
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan inklusif & upaya implementasinya*. Jakarta: PT luxima Metro Media.
- Laelasari, C. (2013). *Manajemen penyelenggara pendidikan inklusif sekolah X Di Kota Bandung*. Thesis, Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mayasari. (2016). *Implementasi kurikulum 2013 pada ABK di SD Muhammadiyah Supen Yogyakarta*. UIN Sunan Kali Jaga: Yogyakarta. Thesis. Diunduh pada 6 Januari 2016
- Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mudjito; Harizal; Elfendri. (2012). *Pendidikan inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pasal 2, 4
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
- Putri, I, Z. (2015). *Implementasi kurikulum 2013 bagi peserta didik berkebutuhan khusus pda mata pelajaran Matematika di Sekolah Inklusif*. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya. Jurnal Pendidikan Khusus. Diunduh pada 6 Januari 2017
- Rumahlatu, D. dkk. (2016). *Analysis of the readiness and implementation of 2013 curriculum in the west part of Seram*. Internasional Journal Of Environmental & Science Education. Vol 11. Diunduh pada 6 Januari 2017
- Sariono. (2013). *Kurikulum 2013: kurikulum generasi emas*. E-jurnal dinas pendidikan Kota Surabaya: Volume 3. Diunduh pada 6 Januari 2017
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta.
- Susanto, R. (2012). *Efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Giwangan*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- UUD RI 1945 pasal 28c ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2.
- UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Hambatan
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1).

